



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DJPB TAHUNAN 2024

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

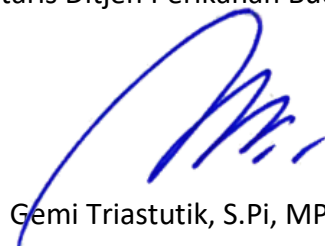
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Tahun 2024 dapat terselesaikan.

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan indikator kinerja sebagai alat ukurnya. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan LKj ini, dengan harapan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang semakin meningkat, disamping dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai evaluasi kinerja untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, Januari 2025

Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Gemi Triastutik, S.Pi, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
LAMPIRAN.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Tugas dan Fungsi	5
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	6
1.5. Kendala dan Permasalahan	10
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024	11
2.2. Sasaran Strategis	12
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	12
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2. Analisis Capaian Kinerja	20
SK.01 Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	20
IKSK.1 Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	20
IKSK.2 Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA	22
IKSK.3 Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	23
IKSK.4 Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi	24

IKSK.5	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya.....	25
IKSK.6	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya	27
IKSK.8	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	30
IKSK.9	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya	31
IKSK.10	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani	32
IKSK.11	Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	33
IKSK.12	Persentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya	35
IKSK.13	Presentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya	37
IKSK.14	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	39
IKSK.15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya	40
IKSK.16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya	41
IKSK.17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	42
IKSK.18	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya.....	44
IKSK.19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	45
IKSK.20	Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya	46
IKSK.21	Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya	47
IKSK.22	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB	48
IKSK.23	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri49	
3.3.	Akuntabilitas Keuangan.....	51
BAB IV PENUTUP		53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024.....	18
Tabel 2. Capaian Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	21
Tabel 3. Capaian Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA	22
Tabel 4. Capaian Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	23
Tabel 5. Capaian Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi.....	24
Tabel 6. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB.....	26
Tabel 7. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya	27
Tabel 8. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB.....	29
Tabel 9. Capaian Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	31
Tabel 10. Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya	32
Tabel 11. Capaian Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani	33
Tabel 12. Capaian Unit kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	34
Tabel 13. Capaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Perikanan Budi Daya	Bidang 36
Tabel 14. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya.....	38
Tabel 15. Capaian Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024	39
Tabel 16. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya	40
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya	41
Tabel 18. Capaian Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB	43
Tabel 19. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya	44
Tabel 20. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	45

Tabel 21. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya.....	47
Tabel 22. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya.....	48
Tabel 23. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB.....	49
Tabel 24. Capaian Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Baya	7
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan	7
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu	8
Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum	9
Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	9
Gambar 6. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024	11
Gambar 7. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024	12
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Revisi Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	16
Gambar 9. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB	17
Gambar 10. Serapan Anggaran Satker Setditjen PB Tahun 2024 per Jenis Belanja	52
Gambar 11. Serapan Anggaran Satker Setditjen PB Tahun 2024 per Sumber Dana	52

LAMPIRAN

Lampiran I : Perjanjian Kinerja Awal	2
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Revisi	6

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Tahun 2024 merupakan laporan pencapaian kinerja yang telah tercapai dalam kurun waktu Juli sampai September Tahun 2024 dan juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2024. Mengacu pada Rancangan Teknokratis Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budidaya Tahun 2020- 2024 maupun Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024, maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Tahun 2024 ini memuat rencana kinerja beserta target yang ingin dicapai serta pengukuran pencapaian sasaran termasuk keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya selama periode Tahun 2024.

PK Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 berisi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Sasaran Strategis (SK.01): Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu:

- 1) **IKSK.1** Nilai PM SAKIP Setditjen Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 84 (Persen) dengan capaian sebesar 100,36 (Persen);
- 2) **IKSK.2** Persentase Pelaku Usaha budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA, target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen), dengan capaian sebesar 224,89 (Persen);
- 3) **IKSK.3** Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi, target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen) dengan capaian sebesar 125 (Persen);
- 4) **IKSK.4** Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi, target nilai yang ditetapkan adalah 100 (Persen) dengan capaian sebesar 100 (Persen);
- 5) **IKSK.5** Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 85 (Indeks) dengan capaian sebesar 99,21 (Persen);
- 6) **IKSK.6** Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 75 (Indeks) dengan capaian sebesar 123,08 (Persen);
- 7) **IKSK.7** Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB, target nilai yang ditetapkan adalah 3 (Level) dengan capaian sebesar 200 (Persen);
- 8) **IKSK.8** Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilaian Internal KKP, target nilai yang ditetapkan adalah 76 (Nilai) dengan capaian sebesar 111,74 (Persen);
- 9) **IKSK.9** Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya, target nilai yang ditetapkan adalah 100 (Persen) dengan capaian sebesar 100 (Persen);

- 10) **IKSK.10** Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani, target nilai yang ditetapkan adalah 65 (Persen) dengan capaian sebesar 153,85 (Persen);
- 11) **IKSK.11** Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, target nilai yang ditetapkan adalah 94 (Persen) dengan capaian sebesar 141,84 (Persen);
- 12) **IKSK.12** Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 90 (Persen) dengan capaian sebesar 141,97 (Persen);
- 13) **IKSK.13** Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 86 (Persen) dengan capaian sebesar 116,28 (Persen);
- 14) **IKSK.14** Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024, target nilai yang ditetapkan adalah 100 (Persen) dengan capaian sebesar 100 (Persen);
- 15) **IKSK.15** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen) dengan capaian sebesar 116,68 (Persen);
- 16) **IKSK.16** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 93,76 (Nilai) dengan capaian sebesar 94,89 (Persen);
- 17) **IKSK.17** Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen) dengan capaian sebesar 105,88 (Persen);
- 18) **IKSK.18** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 86 (Nilai) dengan capaian sebesar 130,01 (Persen);
- 19) **IKSK.19** Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen) dengan capaian sebesar 103,68 (Persen);
- 20) **IKSK.20** Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen) dengan capaian sebesar 123,80 (Persen);
- 21) **IKSK.21** Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya, target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen) dengan capaian sebesar 125 (Persen);
- 22) **IKSK.22** Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggara SPIP Unit DJPB, target nilai yang ditetapkan adalah 3,3 (Nilai) dengan capaian sebesar 108,18 (Persen); dan
- 23) **IKSK.23** Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri, target nilai yang ditetapkan adalah 75 (Persen) dengan capaian sebesar 117,64 (Persen).

Perbaikan atas ketercapaian kinerja yang ditetapkan pada tahun berikutnya adalah sebagaimana berikut:

- 1) Melakukan proses usul kenaikan pangkat secara periodic dan melakukan peremajaan data pegawai sesuai Nomenklatur terbaru;
- 2) Melakukan inventarisasi aset BMN ke satker binaan di lingkup DJPB (UPT dan Provinsi);
- 3) Memantau dan mengevaluasi terhadap Satker yang perlu melakukan penghapusan aset BMN yang rusak berat;
- 4) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan aset BMN;
- 5) Melakukan monitoring, evaluasi terhadap input Capaian Output pada aplikasi SAKTI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh kemenkeu pada setiap bulannya;
- 6) Memastikan penyediaan dokumen perencanaan kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound (SMART);
- 7) Koordinasi dengan Pusdatin KKP dan optimalisasi penganggaran tahun 2025 untuk mendukung pencapaian pelaku usaha budidaya yang ter-integrasi dengan KUSUKA;
- 8) Melakukan peremajaan data diklat pada aplikasi SIASN bagi pegawai lingkup DJPB;
- 9) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pendampingan dan konsultasi hukum mengenai pengadaan barang dan jasa dibidang perikanan budidaya;
- 10) Menekankan kepada Satker di lingkup DJPB untuk mematuhi standar 5W1H pada saat melakukan postingan;
- 11) Melengkapi dokumen pendukung atas tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI;
- 12) Melakukan monitoring dan evaluasi revisi halaman III DIPA secara berkala;
- 13) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Satker dalam melakukan proses PBJ;
- 14) Mempertahankan nilai Maturitas yang telah diperoleh; dan
- 15) Mempertahankan atau meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 merupakan wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya periode Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Budidaya tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta Indikator Kinerja Utama Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 adalah Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu: (i) untuk menyajikan pertanggungjawaban dan informasi mengenai rencana dan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Perikanan Budi Daya dan(ii) sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang terkait dengan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya sehingga dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah perbaikan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Setditjen Perikanan Budi Daya mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Setditjen Perikanan Budi Daya merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

2. Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

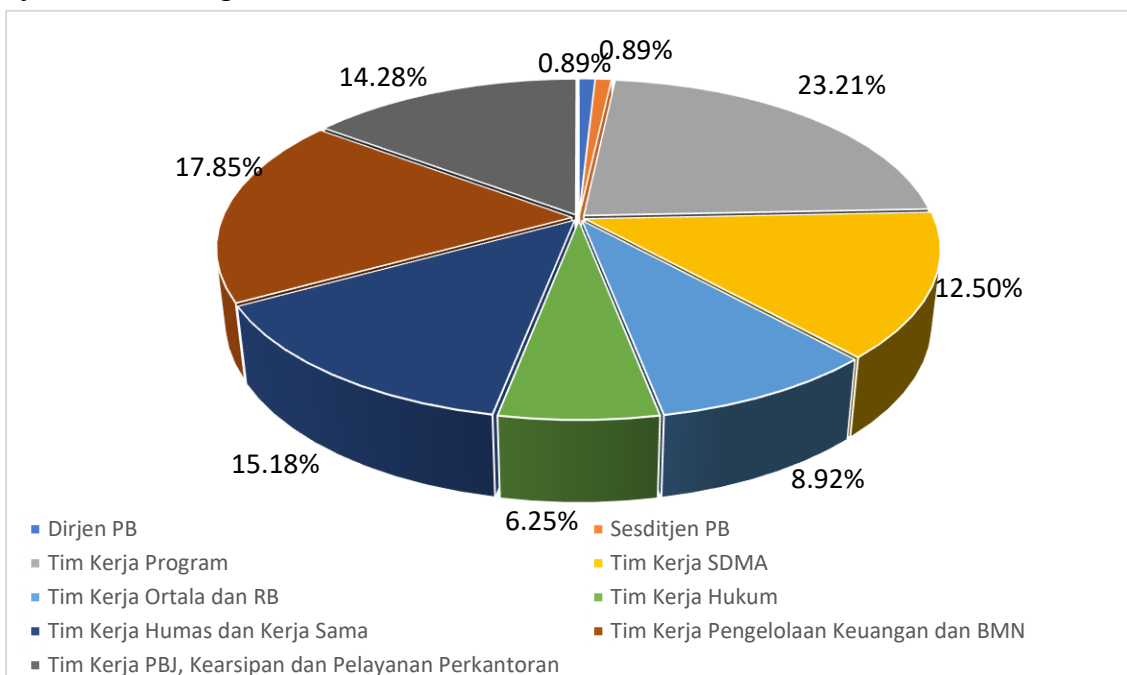
3. Fungsi

Setditjen Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- 5) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

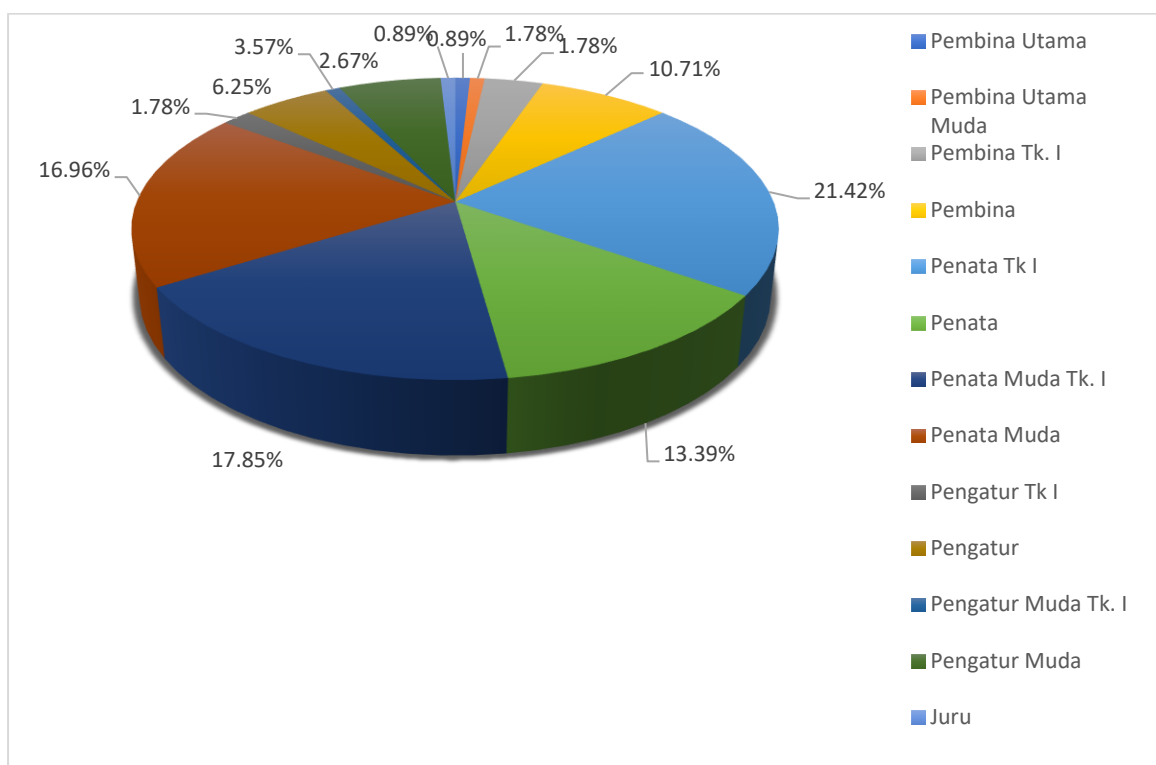
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 berjumlah 112 orang, terdiri dari Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya (Dirjen PB), Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Sesditjen PB) dan 112 orang pegawai tersebar pada 7 Tim Kerja lainnya, yaitu: (i) Tim Kerja Program berjumlah 26 orang; (ii) Tim Kerja SDMA berjumlah 14 orang; (iii) Tim Kerja Ortala dan RB berjumlah 10 orang; (iv) Tim Kerja Hukum berjumlah 7 orang; (v) Tim Kerja Humas dan Kerja Sama berjumlah 17 orang; (vi) Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN berjumlah 20 orang, dan (vii) Tim Kerja PBJ, Kearsipan dan Pelayanan Perkantoran berjumlah 16 orang.



Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Baya

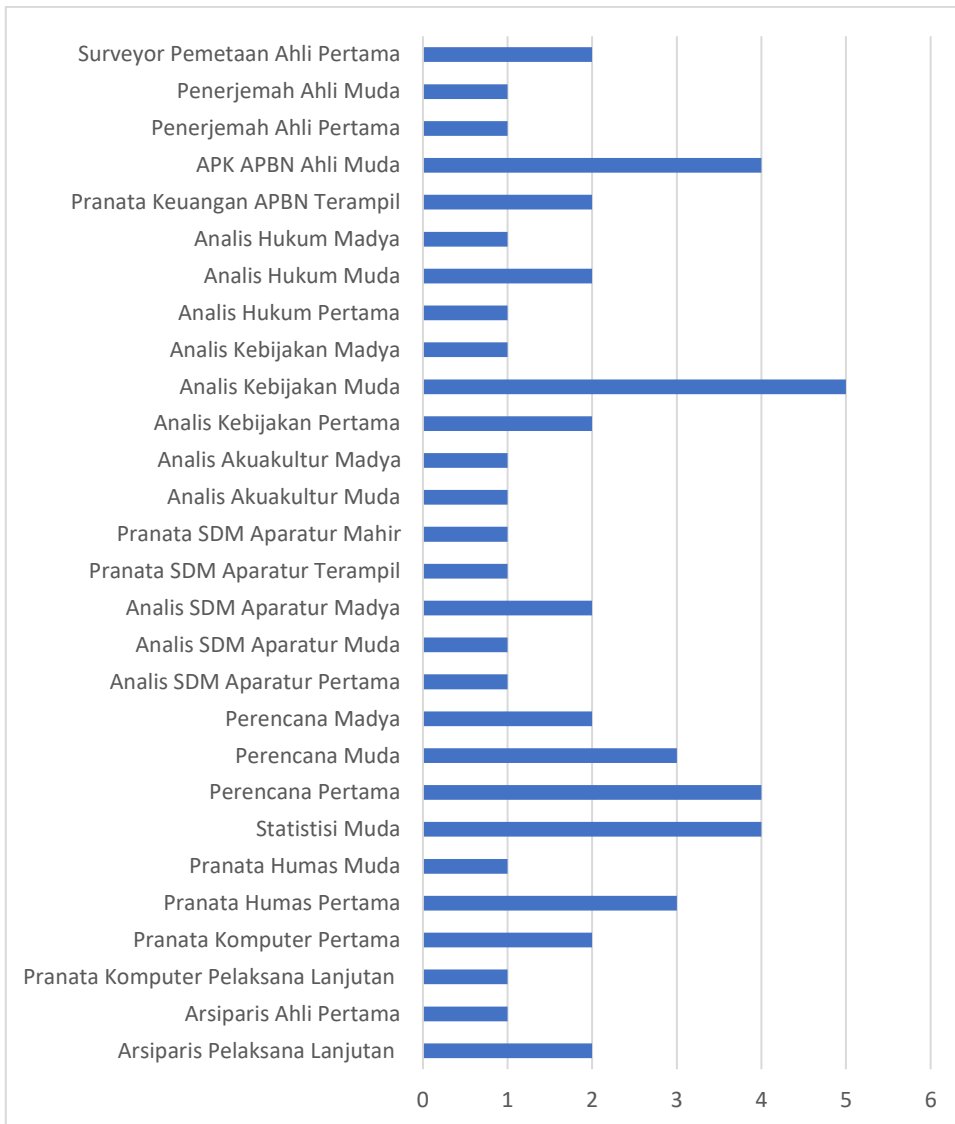
Berdasarkan pangkat/golongan ruang, pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya terdiri dari: (i) Pembina Utama berjumlah 1 orang; (ii) Pembina Utama Muda berjumlah 2 orang; (iii) Pembina Tk. I berjumlah 2 orang; (iv) Pembina berjumlah 12 orang; (v) Penata Tk. I berjumlah 24 orang; (vi) Penata berjumlah 15 orang; (vii) Penata Muda Tk. I berjumlah 20 orang; (viii) Penata Muda berjumlah 19 orang; (ix) Pengatur Tk. I berjumlah 2 orang; (x) Pengatur berjumlah 7 orang; (xi) Pengatur Muda Tk. I berjumlah 4 orang; (xii) Pengatur Muda berjumlah 3 orang; dan (xiii) Juru berjumlah 1 orang.



Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan

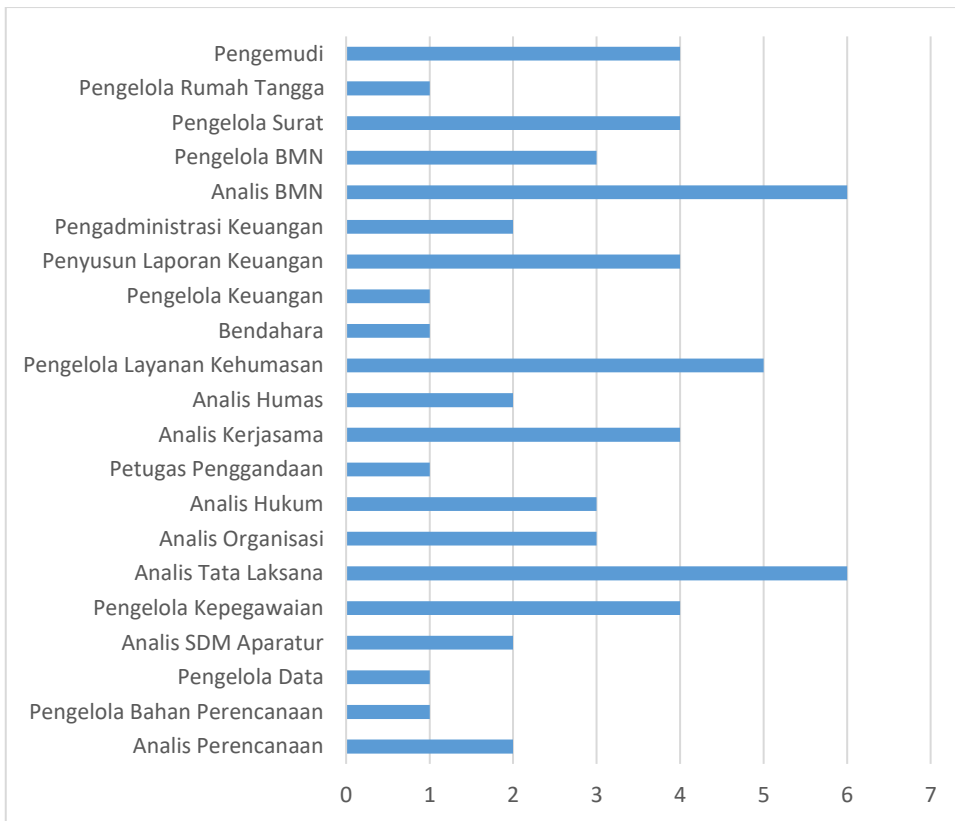
Sedangkan pejabat fungsional tertentu pada Setditjen Perikanan Budi Daya berjumlah 37 orang yang terdiri dari Arsiparis Pelaksana Lanjutan, Asiparis Ahli Pertama, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Humas Ahli Pertama, Pranata Humas Ahli Muda, Statistisi Ahli Muda, Perencana Ahli Pertama, Perencana Ahli Muda, Perencana Ahli Madya, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Pranata SDM Aparatur Terampil, Pranata SDM Aparatur Mahir, Analis Akuakultur Ahli Muda, Analis Akuakultur Ahli Madya, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli Madya, Analis Hukum Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Muda, Analis Hukum Ahli Madya, Pranata Keuangan

APBN, APK APBN Pertama, APK APBN Muda, Penerjemah Ahli Pertama, Penerjemah Ahli Muda, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama.



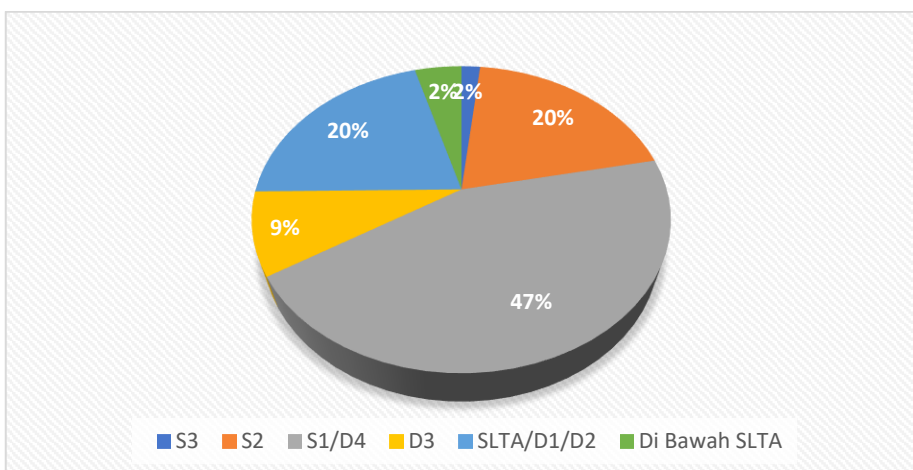
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu

Pejabat Fungsional Umum pada Setditjen Perikanan Budidaya berjumlah 55 orang, terdiri dari Analisis Perencanaan, Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelola Bahan Perencanaan, Pengelola Data, Analisis SDM Aparatur, Pengelola Kepegawaian, Analisis Tata laksana, Analisis Organisasi, Analisis Hukum, Petugas Penggandaan, Analisis Kerjasama, Analisis Humas, Pengelola Layanan Kehumasan, Bendahara, Pengelola Keuangan, Pengadministrasi Keuangan, Analisis BMN, Pengelola BMN, Pengelola Surat, Pengelola Rumah Tangga, dan Pengemudi.



Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum

Sementara itu pengelompokan menurut jenjang pendidikannya, pegawai pada Setditjen Perikanan Budidaya terdiri dari: (i) Lulusan S-3 berjumlah 2 orang; (ii) Lulusan S-2 berjumlah 23 orang; (iii) Lulusan S-1/D-4 berjumlah 53 orang; (iv) Lulusan D-3 berjumlah 10 orang; (v) Lulusan D-2/D-1/SLTA berjumlah 22 orang; dan (vi) Lulusan di bawah SLTA sebanyak 2 orang.



Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1.5. Kendala dan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Dalam hal sumber daya manusia di lingkup perikanan budidaya, yang secara umum meliputi perubahan struktur organisasi yang dinamis dan kreativitas sumberdaya manusia untuk pengembangan organisasi masih rendah,
2. Masih terdapat pegawai yang belum dapat diproses mutasinya karena sedang dalam proses perubahan nomenklatur jabatan,
3. Terkait pembahasan maupun tanggapan/masukan antara Ditjen Perikanan Budi Daya dengan mitra kerja sama membutuhkan waktu yang cukup lama,
4. Masih terdapat kekurangan dokumen data dukung tindak lanjut atas temuan-temuan hasil pemeriksaan, dan
5. Beberapa dokumen penyelesaian tindak lanjut baru dapat diselesaikan ketika sudah memasuki triwulan berikutnya sehingga data yang sudah diunggah tidak dapat meningkatkan capaian yang ada.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 ini menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024, yang diketahui dari realisasi capaian target indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan, maka akan dapat diketahui permasalahan yang ada dan tindak lanjutnya demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian LKj Tahunan Setditjen Perikanan Budi Daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bab I, Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Keragaan SDM, Kendala dan Permasalahan serta Sistematika Penyajian Laporan.
2. **Bab II, Perencanaan Kinerja**, menguraikan tentang Rencana Strategis, Sasaran Strategis, PK Setditjen Perikanan Budi Daya dan Pengukuran Capaian Kinerja.
3. **Bab III, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya untuk setiap SK sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian tersebut serta akuntabilitas keuangan.
4. **Bab IV, Penutup**, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya serta perbaikan yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.
5. **Lampiran**, menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja yang diperlukan sebagai penjelasan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budi Daya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 6. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi yang meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2020-2024 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Setditjen Perikanan Budi Daya telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan SS dan IKK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Setditjen Perikanan Budi Daya selama satu tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) PK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2024.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan kerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk: (i) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (ii) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; (iii) Alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah; (iv) Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (v) Dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Adapun Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024 hasil revisi dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini, sedangkan Perjanjian Kinerja Awal dapat dilihat pada Gambar 8.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditiன்ப@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya

Gemi Triastutik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1.	Nilai PM SAKIP Setditjen PB (Persen)	82
		2.	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
		3.	Persentase Data Produksi Perikanan Budi Daya yang Tervalidasi (Persen)	80
		4.	Persentase Data Realisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan Ikan yang Terintegrasi (Persen)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budidaya (Indeks)	85
		6.	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya (Nilai)	75
		7.	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB (Level)	3
		8.	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP (Nilai)	76
		9.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
		10.	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani (Persen)	65
		11.	Unit Kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94
		12.	Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	90
		13.	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya (Persen)	≥86
		14.	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023 (Persen)	
		15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
		16. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,76
		17. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	80
		18. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	71
		19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
		20. Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
		21. Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
		22. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB (Nilai)	3,3
		23. Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri (Persen)	75

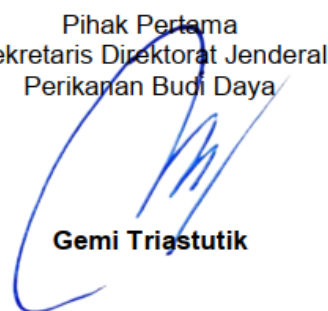
Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	111.906.162.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024		111.906.162.000


Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik

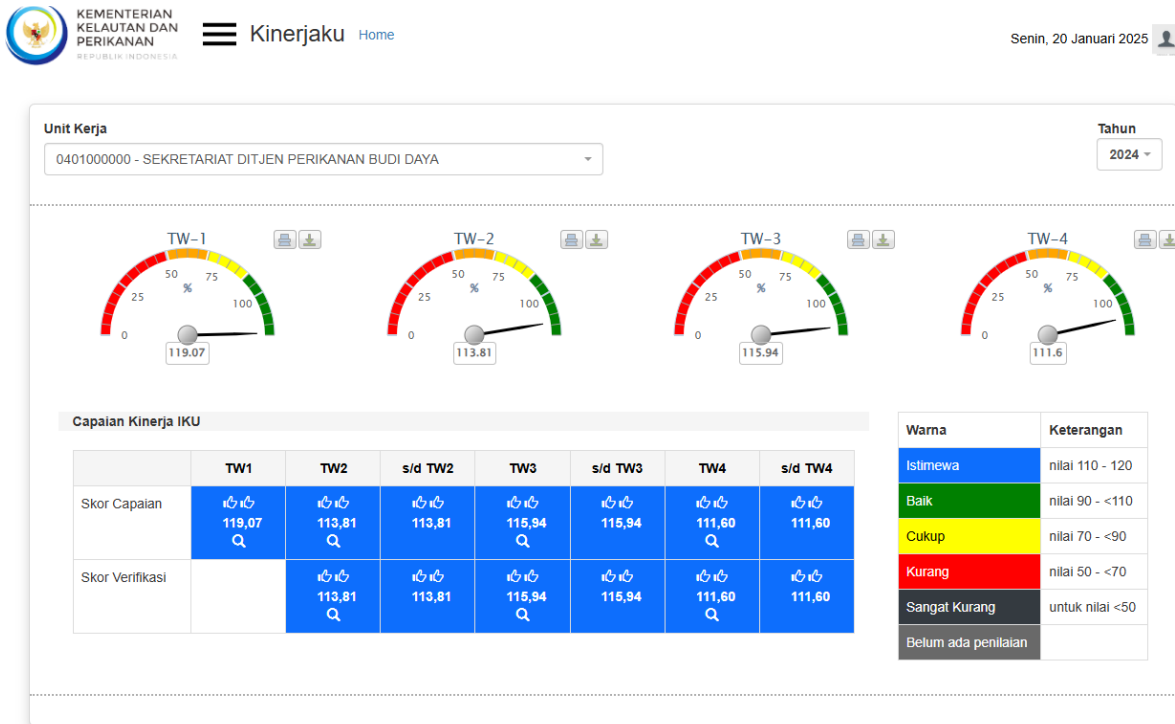
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Revisi Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada PK Setditjen Perikanan Budi Daya dengan data pencapaian kinerjanya. Cara pengukuran mengacu pada manual indikator dan pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas.

Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh tim kinerja sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat. Pengukuran indikator kinerja yang baik adalah dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data yang disajikan harus: (i) *Valid*, diukur menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan manual indikator; (ii) *Reliable*, meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (iii) *Obyektif*, bebas dari intervensi/kepentingan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala, didukung oleh implementasi dari aplikasi *Balanced Scorecard* (BSC) yaitu Kinerjaku, yang merupakan sistem aplikasi pengelolaankinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id) ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indicator yang dibawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indicator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target) dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian target kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Keberhasilan capaian dapat terlihat pada nilai capaian IKU dan IK Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dengan nilai NPSS sebesar 111,60% dengan didukung oleh anggaran sebesar Rp.99.551.029.000,- dari anggaran semula sebesar Rp.103.365.423.000,-, dikarenakan adanya pagu blokir sebesar Rp.3.814.394.000,-.

Sehingga pada Tahun 2024 capaian realisasi keuangan adalah senilai Rp.98.802.014.614,- atau sebesar 99,25% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Terkait hal tersebut, maka segala upaya perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024 dengan capaian kinerja yang dihasilkan sampai Tahun 2024.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi Kinerjaaku, pengukuran capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	(%)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat DJPB	1	Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	82	84,3	100,36
		2	Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA	80	224,89	281,11
		3	Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	80	80	100
		4	Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi	100	100	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat DJPB	5	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya	85	84,33	99,21
		6	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya	75	92,31	123,08

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	(%)
		7 Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB	3	6	200
		8 Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	76	84,92	111,74
		9 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya	100	100	100
		10 Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani	65	65	100
		11 Unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94	133,33	141,97
		12 Presentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya	90	127,77	141,97
		13 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya	86	100	116,28
		14 Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024	100	100	100
		15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	80	93,34	116,68
		16 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	93,76	88,97	94,89
		17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	80	84,7	105,88

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	(%)
		18 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya	71	92,31	130,01
		19 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	80	82,94	103,68
		20 Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya	80	99,04	123,80
		21 Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya	80	80	100
		22 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggara SPIP Unit DJPB	3,3	3,57	108,18
		23 Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri	75	88,23	117,64

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Mengukur kinerja tidak hanya dengan melakukan *entry* data capaian, namun juga analisis terhadap pencapaian kinerjanya, karena dengan melakukan analisis kinerja, informasi mengenai kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui dan bermanfaat untuk ketepatan penyusunan strategi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing IK sebagai berikut:

SK.01 Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu sistem atau cara pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang: administrasi, ekonomi hingga politik untuk mengatur segala permasalahan sosial negara. Sejatinya, tata kelola pemerintahan tersebut senantiasa memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju, yaitu untuk mencapai pemerintahan yang ideal.

IKSK.1 Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di DJPB. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi SAKIP di DJPB dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 82 (nilai), dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 84,3 (nilai) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.4.148.097.900,-.

Tabel 2. Capaian Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		
-	59,05	84	84	84,3	100,36	100,36	42,76	84	100,36

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	59,05	84	84,3	100,36	84	100,36

Pada Tahun 2024 kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini adalah:

1. Refreshment sosialisasi tatacara verifikasi capaian pengukuran kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP melalui rapat internal; dan
2. Pelaporan kinerja lingkup Setditjen yang telah mengacu pada perubahan Nomenklatur baru.

Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu belum adanya sosialisasi dalam melakukan verifikasi capaian pengukuran kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP dan karena adanya perubahan Nomenkelatur baru sehingga mengakibatkan ketepatan waktu dalam pelaporan dokumen tidak tepat waktu.

Rencanaaksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Memastikan penyediaan dokumen perencanaan kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound (SMART)

- Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak

IKSK.2 Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, maka KKP melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).

Kartu KUSUKA berfungsi sebagai Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/*updating* data pelaku usaha budidaya ikan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen) dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 224,89 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.6.860.642.960,-.

Tabel 3. Capaian Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA								
2023		2024				% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama			
-	80	80	80	224,89	281,11	281,11	181,11	281,11	281,11	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	80	80	224,89	281,11	80	281,11

Pada Tahun 2024 kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini adalah telah dilakukan proses revisi dan pembayaran enumerator sesuai BOP yang didapatkan dari Pusdatin.

Kendala yang dihadapi pada Tahun 2024 yaitu adanya Keterbatasan anggaran honor enumerator.

Rencanaaksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu memastikan dan mengoptimalkan penganggaran Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian pelaku usaha budidaya yang ter-intergrasi dengan KUSUKA.

IKSK.3 Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi

Data produksi adalah catatan atas kumpulan fakta mengenai suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda. Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/Budidaya.

Budidaya perikanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Definisi Budidaya perikanan lainnya adalah campur tangan (upaya-upaya) manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan. Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu.

Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi sampling tervalidasi yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target sampling serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 100 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.6.860.642.960,-.

Tabel 4. Capaian Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Data Produksi Perikanan Budiaya yang Tervalidasi							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV					
-	98,74	80	80	100	125	125	1,27	80	125

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Data Produksi Perikanan Budiaya yang Tervalidasi									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	98,74	80	100	125	80	125

Pada Tahun 2024, kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Koordinasi dengan validator dan enumerator untuk mempercepat proses validasi data produksi; dan
2. Melakukan pengumpulan bahan untuk analisis data triwulanan dan tahunan.

Kendala yang dialami selama Tahun 2024 yaitu Validator tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum tepat waktu dalam melakukan peng-inputan data produksi.

Rencanaaksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan pusdatin dan validator tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk percepatan input dan validasi data tahun 2024; dan
2. Melakukan analisis data capaian produksi tahun 2024.

IKSK.4 Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi

Geospasial dan Informasinya diatur dengan UU 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Informasi Geospasial (IG) adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD).

Persentase Realisasi Data IGT lahan pembudidayaan ikan yang Terintegrasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data IGT lahan pembudidayaan ikan yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1 sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 100 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.6.860.642.960,-.

Tabel 5. Capaian Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		
-	100	100	100	100	100	100	-	100	100

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini yaitu *quality control* terhadap hasil delineasi untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam peta.

Kendala yang dialami pada Tahun 2024 yaitu keterbatasan sumberdaya dalam melakukan delineasi baik dari sisi SDM dan pendukung lainnya.

Sedangkan rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan BIG untuk langkah langkah pelaksanaan delineasi; dan
2. Melakukan sosialisasi proses delineasi kepada eslon 2 lingkup DJPB.

IKSK.5 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- 1) Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.
- 2) Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir.

- 3) Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - b. Perilaku kerja.
- 4) Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 85 (indeks), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 84,33 (indeks) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.1.925.316.997,-.

Tabel 6. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian			
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	81	85	85	84,33	99,21	99,21	4,11	85	99,21

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	74,7	85,8	84,41	81	85	84,33	99,21	85	99,21

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui Workshop SAKIP yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan UGM; dan
2. Pelaksanaan penilaian kinerja individu Triwulan III tahun 2024.

Kendala yang dihadapi pada Tahun 2024 yaitu belum adanya penataan SDM sesuai dengan perubahan Nomenklatur.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan peremajaan data diklat pada aplikasi SIASN bagi pegawai lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya;
2. Melakukan penilaian kinerja individu tahun 2024; dan
3. Melakukan penataan SDM sesuai dengan perubahan Nomenklatur.

IKSK.6 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya

Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya adalah upaya untuk mengelola, meningkatkan dan mengendalikan standar profesi Jabatan Fungsional di bidang Perikanan Budi Daya, yang terdiri atas 4 (empat) jabatan fungsional, yaitu (1) Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Kategori Keahlian /Analisis Akuakultur, (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian/ Pengelola Kesehatan Ikan, (3) Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Kategori Keterampilan/Teknisi Akuakultur, dan (4) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keterampilan/Teknisi Kesehatan Ikan, dengan lingkup pengelolaan yang meliputi pembinaan, pemberian rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional, penilaian kinerja, penyusunan pedoman, penata laksanaan administrasi jabatan fungsional, dan fasilitatif pengembangan karir jabatan fungsional bidang perikanan budi daya.

Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya dalam upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi Jabatan Fungsional berdasarkan Permen PAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional, Per BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, dan Keputusan Menteri KP Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (nilai), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 92,31 (nilai) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.1.559.209.102,-.

Tabel 7. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		
-	85,80	75	75	92,31	123,08	123,08	7,58	75	123,08

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	85,80	75	92,31	123,08	75	123,08

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Telah dilaksanakan FGD terkait proses penyesuaian nomenklatur JF Pengawas Perikanan jenjang keterampilan dan keahlian lainnya (pertama, muda, dan madya)
2. Rapat koordinasi dan konsultasi penyelesaian penyesuaian nomenklatur bersama BKN
3. Penyiapan dokumen nominatif proses penyesuaian nomenklatur JF Pengawas Perikanan jenjang keterampilan dan keahlian lainnya (pertama, muda, dan madya)
4. Membuat panduan Penetapan Angka Kredit bagi pegawai yang lulus uji kompetensi perpindahan JF dalam bentuk surat pemberitahuan
5. Perbaiki data SKR yang dipergunakan dalam Rancangan Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
6. Verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya untuk 19 Instansi Daerah

Kendala yang dihadapi pada Tahun 2024 yaitu:

1. Penetapan Angka Kredit JF Pengawas Perikanan Keterampilan tidak dapat ditetapkan secara elektronik karena tidak dikenali sudah dalam aplikasi eKinerja BKN; dan
2. Proses penyesuaian nomenklatur JF Pengawas Perikanan dalam JF Analis Akuakultur dan Teknisi Akuakultur di lingkup DJPB belum selesai, sehingga monitoring dan evaluasi perubahan nomenklatur jabatan fungsional bidang perikanan budidaya dan pengelolaan jabatan fungsional pada Instansi daerah belum dapat dilakukan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Mengusulkan penetapan penyesuaian nomenklatur JF Pengawas Perikanan jenjang keterampilan dan keahlian lainnya (pertama, muda, dan madya);
2. Menyelesaikan Penetapan Angka Kredit Penyesuaian Nomenklatur JF Pengawas Perikanan jenjang keterampilan dan keahlian lainnya (pertama, muda, dan madya);
3. Membuat draft Rancangan Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan;
4. Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya untuk instansi daerah berdasarkan rekomendasi/ penetapan prioritas Biro SDM Aparatur dan Organisasi; dan
5. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terkait perubahan nomenklatur jabatan fungsional bidang perikanan budidaya dan pengelolaan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya lingkup Instansi Daerah.

IKSK.7 Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat,

kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN.

Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 3 (level), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 6 (level) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.1.925.316.997,-.

Tabel 8. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian			
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	6	3	3	6	200	200	-	3	200

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	6	3	6	200	3	200

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Proses usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2024;
2. Proses usul mutasi ASN; dan
3. Peremajaan data pegawai.

Kendala yang dihadapi pada Tahun 2024 yaitu masih terdapat pegawai yang belum dapat diproses mutasinya karena masih dalam proses perubahan nomenklatur jabatan.

Rencanaaksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan proses usul kenaikan pangkat secara berkala; dan
2. Melakukan peremajaan data pegawai secara periodik.

IKSK.8 Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan menunjuk satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja berstatus WBK/WBBM, dengan persyaratan antara lain dianggap sebagai unit penting/strategis dalam melaksanakan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup baik.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Proses penetapan predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan penilaian berjenjang dimulai dari penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP, kemudian Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu Kementerian PAN-RB dengan mengacu pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah.

Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) merupakan suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 (survei 3,20).

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 76 (nilai), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 84,92 (nilai) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.929.772.902,-.

Tabel 9. Capaian Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	79,93	76	76	84,92	111,74	111,74	-	76	111,74

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	5	-	8	11	79,93	76	84,92	111,74	76	111,74

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu Asistensi (Pendampingan) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu Update pemenuhan data dukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) masih belum tepat waktu.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu Melakukan koordinasi dan monitoring dengan Satker di lingkup DJPB agar dapat melakukan update data dukung secara berkala dan tepat waktu.

IKSK.9 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 100 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.1.100.436.000,-.

Tabel 10. Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024			
-	100	100	100	100	100	100	-	100	100

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
87,50	87,50	108,33	70,00	100	100	100	100	100	100	100	100

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pengendalian Resistensi Antimikroba pada Perikanan Budi Daya.

Kendala yang dialami pada Tahun 2024 yaitu partisipasi aktif oleh peserta konsultasi publik belum maksimal.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan Finalisasi penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pengendalian Resistensi Antimikroba pada Perikanan Budi Daya;
2. Berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait tindak lanjut hasil Rancangan Peraturan Menteri KP untuk menjadi Peraturan Menteri KP; dan
3. Melakukan evaluasi atas per-UU yang berkaitan dengan DJPB terkait isu-isu terbaru.

IKSK.10 Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani

Advokasi hukum adalah pemberian layanan hukum kepada penerima advokasi yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.

Advokasi terdiri dari (1) konsultasi hukum, (2) pendapat hukum, (3) pendampingan hukum, dan (4) penyelesaian permasalahan hukum.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 65 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 100 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.1.100.436.000,-.

Tabel 11. Capaian Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		
-	65	65	65	100	153,85	153,85	53,84	65	153,85

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	65	65	100	153,85	65	153,85

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 yaitu telah dilakukan koordinasi dan konsultasi hukum dengan Satker di lingkup DJPB terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dibidang perikanan budidaya.

Sedangkan kendala yang dihadapi pada Tahun 2024 yaitu unit kerja belum disiplin dalam penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pendampingan dan konsultasi hukum mengenai pengadaan barang dan jasa dibidang perikanan budidaya.

IKSK.11 Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar *Collaboration Office* adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Strategis dari Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar *Collaboration Office* ini adalah Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah di akses, agar dapat mencapai nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja

Utama (IKU), yaitu persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Pengukuran IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP menggunakan platform Portal *Collaboration Office* <https://portal.kkp.go.id>. Terdapat menu Linimasa yaitu merupakan salah satu halaman pada menu Pengetahuan yang menampilkan postingan atau unggahan dari pimpinan atau pegawai yang memiliki hak akses untuk membuat postingan.

Komponen penilaian pada sistem manajemen pengetahuan terstandar *Collaboration Office* yaitu keaktifan (100%) maksimal nilai yang dapat diterima pegawai yang wajib dinilai, yaitu pejabat Eselon II.

Penghitungan indikator manajemen pengetahuan berasal dari penilaian komponen keaktifan yang dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Adapun formula untuk penghitungan capaian indikator tersebut, terdiri dari:

1. Kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H (*What, When, Where, Who, Why dan How*) dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 0,5.
2. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
3. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Selain itu, juga terdapat cara mengukur capaian yaitu dengan menghitung keaktifan pada setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah di tentukan. Pengukuran level 1 dihitung dengan keaktifan pejabat Eselon II yang memenuhi unsur pengetahuan sesuai kriteria.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 94 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 133,33 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.4.678.467.950,-.

Tabel 12. Capaian Unit kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Unit kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		
-	133,33	94	94	133,33	141,84	141,84	-	94	141,84

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja	Unit kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar										
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
51,8	72,33	92,47	100	100	100	133,33	94	100	141,84	94	141,84

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan setiap unit kerja eselon 2 DJPB baik secara formal melalui Memorandum ataupun Informal melalui Tim Kerja Dukungan Manajerial serta sekretaris terkait penggunaan aplikasi platform portal collaboration office serta keaktifan peserta;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi postingan agar memenuhi unsur 5W1H (What, When, Where, Who, Why, dan How); dan
3. Melakukan koordinasi dengan Pusdatin untuk informasi capaian, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta sehingga dapat diatasi.

Kendala yang dialami dalam mencapai indicator kinerja pada Tahun 2024 yaitu:

1. Masih adanya Satker di lingkup DJPB dalam melakukan postingan belum memenuhi unsur 5W1H (What, When, Where, Who, Why, dan How); dan
2. Untuk terus meningkatkan jumlah maksimal postingan yang dapat dinilai oleh PUSDATIN sebelum batas waktu yang di tentukan dalam setiap periodenya

Rencanaaksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Menekankan kepada Satker di lingkup DJPB untuk mematuhi standar 5W1H pada saat melakukan postingan; dan
2. Menekankan kepada Satker di lingkup DJPB dalam melakukan postingan untuk mencapai jumlah maksimal yang dapat dinilai oleh PUSDATIN sebelum batas waktu yang di tentukan dalam setiap periode.

IKSK.12 Persentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya

Perjanjian adalah kesepakatan antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang perikanan budidaya yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kelautan dan Perikanan.

Prakarsa kerja sama dapat berasal dari internal Ditjen Perikanan Budidaya maupun dari calon mitra Kerja Sama. Dokumen kerja sama bidang perikanan budidaya merupakan bentuk nota

kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani antara 2 (dua) pihak atau lebih.

Nilai Indikator capaian dari prosentasi dokumen yang diterima/ditindaklanjuti diperoleh dari jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah dokumen yang diterima, dengan target indikator tahunan sebesar 90%. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah dengan melakukan review, pembahasan maupun membuat draft/konsep Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan yang diterima dari unit Eselon II lingkup Ditjen Perikanan Perikanan Budidaya maupun dari UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan pihak mitra lainnya

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 90 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 127,77 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.2.983.569.275,-.

Tabel 13. Capaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	100	90	90	127,77	141,97	141,97	27,77	90	141,97

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
95	-	89,05	90,26	94,74	100	100	90	127,77	141,97	90	141,97

Adapun kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Review Perjanjian Kerja Sama antara BPBAT Jambi dengan SMKN 1 Pasir Penyau
2. Review Perjanjian Kerja Sama antara BPBAT Jambi dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi
3. Review Perjanjian Kerja Sama antara BPBAT Jambi dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau
4. Pembahasan kerjasama dengan IFAD

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini yaitu Pembahasan maupun tanggapan/masukan dari mitra kerja sama di lingkup DJPB membutuhkan waktu yang cukup lama.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu menindaklanjuti dari hasil audiensi dengan pihak mitra.

IKSK.13 Presentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya

Berita positif adalah kalimat berita yang di dalamnya tidak dijumpai ada pengingkaran. Penghitungan Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya.

Dalam rangka menyebarluaskan pencapaian pembangunan Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru, pada sub sektor perikanan budi daya yaitu pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, salah satu langkah yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas Ditjen Perikanan Budi Daya adalah pelaksanaan penyebaran informasi dan publikasi terkait kegiatan kunjungan kerja pimpinan, yaitu kegiatan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Tim Komisi IV DPR RI serta stakeholder lainnya. Kegiatan ini dilakukan di berbagai lokasi perikanan budidaya maupun Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB.

Peliputan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut disusun ke dalam bentuk press release, selanjutnya bekerjasama dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebarluaskan pemberitaan tersebut ke berbagai media, baik cetak maupun online.

Perhitungan Rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budi daya dihitung dalam kurun periode triwulan. Terdapat komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian dalam menghitung rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budi daya terdiri dari 2 (dua) tolak ukur, yaitu: (i) pemberitaan netral dan positif; dan (ii) total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya.

Selain itu, juga terdapat komponen pembentuk dan cara mengukur, yaitu:

1. Penilaian dilakukan setiap triwulan
2. Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif
3. Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 86 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 100 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.4.678.467.950,-.

Tabel 14. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentasi Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	100	86	86	100	116,28	116,28	-	86	116,28

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentasi Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	100	86	100	116,28	86	116,28

Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri terkait dengan pemberitaan netral dan positif di bidang perikanan budi daya; dan
2. Pengumpulan pemberitaan harian sub sektor perikanan budi daya serta mengantisipasi kemunculan berita negatif dan persentase berita negatif.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu Minimnya data dukung untuk menghasilkan materi press release dalam rangka meningkatkan publikasi program unggulan sub sektor perikanan budi daya.

Rencanaaksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Mengirimkan Surat kepada Unit Kerja Eselon II serta UPT Lingkup DJPB dalam rangka Permintaan Dukungan Data dan Informasi Untuk Keperluan Publikasi meliputi Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB dll; dan
2. Melakukan publikasi kegiatan DJPB secara masif dengan melakukan penyebaran melalui Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB dll.

IKSK.14 Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2024 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2024 (audit) tidak melebihi 1%.

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 100 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.5.221.934.195,-.

Tabel 15. Capaian Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian			
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	100	100	100	100	100	100	-	100	100

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100

Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu Menyusun konsep surat sebagai tindaklanjut atas intruksi Menteri Kelautan dan

Perikanan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI terhadap satker lingkup DJPB untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahun anggaran 2023.

Kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat Kekurangan dokumen data dukung tindak lanjut atas temuan-temuan hasil pemeriksaan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu melengkapi dokumen pendukung atas tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

IKSK.15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 93,34 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.5.221.855.000,-.

Tabel 16. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	89,15	80	80	93,34	116,68	116,68	4,69	80	116,68

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Targ et 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	74,32	70,41	67,21	89,86	89,15	80	93,34	116,68	80	116,68

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 yaitu telah dilaksanakan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal secara bertahap.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 yaitu beberapa dokumen penyelesaian tindak lanjut baru dapat diselesaikan ketika sudah memasuki triwulan berikutnya sehingga data yang sudah diunggah tidak dapat meningkatkan capaian yang ada.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu Melakukan follow up secara berkala atas data yang sebelumnya telah diminta dan melakukan penyelesaian tidak hanya pada akhir triwulan melainkan di sepanjang triwulan.

IKSK.16 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya

Penilaian IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat ketentuan umum bahwa penilaian IKPA terdiri dari 3 parameter yaitu :

1. Kualitas implementasi perencanaan anggaran, dimana terdapat 2 penilaian parameter yaitu revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA,
2. Kualitas pelaksanaan anggaran, dimana terdapat 5 penilaian parameter yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM, dan
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdapat 1 penilaian parameter yaitu Capaian Output.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 93,76 (nilai), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 88,97 (nilai) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.5.221.855.000,-.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		
-	86,50	93,76	93,76	88,97	94,89	94,89	2,85	93,76	94,89

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	95,11	89,07	91,51	86,50	93,76	88,97	94,89	93,76	94,89

Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah dilakukan koordinasi atas perbaikan dua komponen penilaian yang masih dibawah yaitu deviasi halaman III DIPA, dan penyerapan anggaran di lingkup DJPB.

Kendala yang dialami dalam pencapaian indicator tersebut yaitu kurang patuhnya penanggungjawab kegiatan di lingkup Satker DJPB dalam melaksanakan anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA,

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi revisi halaman III DIPA secara berkala; dan
2. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran sesuai target yang telah disusun pada halaman III DIPA.

IKSK.17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat kepatuhan merupakan pengukuran pelaksanaan suatu kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Perhitungan tingkat kepatuhan bisa dikontrol bila suatu pelaksanaan program telah sesuai dengan standart.

Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Pemanfaatan BMN;
2. Pengamanan BMN dengan membuat Berita acara Peminjaman/ BA Pemakaian kepada masing-masing pegawai yang menggunakan BMN;
3. Mengusulkan Penghapusan atas BMN yang rusak berat kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penjualan atau pemusnahan;
4. Menyusun Rencana kebutuhan BMN lingkup satker secretariat;

5. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
6. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
7. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu, akuntabel dan efisien;
8. Melakukan Verifikasi atas usulan BAST 526xxx pada satker pusat yang akan ditandatangani oleh KPB satker Pusat;
9. Melakukan monitoring dan pembinaan Laporan BMN di kepada seluruh anak satker Sekretariat DJPB (Dit. KKI, Dit. Produksi dan Usaha, Dit. Pakan dan Obat Ikan, Dit. Perbenihan);
10. Melakukan Stock opname fisik atas persediaan yang berada di Gudang penyimpanan;
11. Melakukan Pencatatan, monitoring dan mendistribusikan persediaan dan hasil Pengadaan alat pengolah data kepada pegawai Satker Sekretariat DJPB; dan
12. Membuat SOP terkait pengelolaan BMN.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 84,70 (nilai) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.554.007.290,-.

Tabel 18. Capaian Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian			
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	93	80	80	84,70	105,88	105,88	-8,92	80	105,88

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	76,06	93	80	84,70	105,88	80	105,88

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 yaitu telah dilaksanakannya Pengelolaan BMN seperti Penghapusan, Hibah, Pemakaian, Inventarisasi, Dokumentasi, PSP.

Kendala yang muncul pada Tahun 2024 adalah:

1. Belum optimal Satker dalam melakukan inventarisasi aset BMN;
2. Satker masih abai dalam melakukan penghapusan aset BMN yang rusak berat; dan
3. Perlunya adaptasi aplikasi baru simanV2 untuk pengelolaan aset BMN.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya diantaranya yakni:

1. Melakukan inventarisasi aset BMN ke satker binaan di lingkup DJPB (UPT dan Dekon);
2. Memantau dan mengevaluasi terhadap Satker yang perlu melakukan penghapusan aset BMN yang rusak berat; dan
3. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan aset BMN.

IKSK.18 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 71 (nilai), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 92,31 (nilai) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.4.357.048.850,-.

Tabel 19. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		
-	79,52	71	71	92,31	130,01	130,01	16,08	71	130,01

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	98,08	71,49	-	95,23	79,52	71	92,31	130,01	71	130,01

Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini adalah monitoring dan evaluasi terhadap Satker dalam melakukan input Capaian Output secara berkala.

Kendala yang dihadapi yaitu Ketaatan Satker melakukan input Capaian Output dan update-ing Halaman III DIPA.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Memastikan input Capaian Output pada aplikasi SAKTI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh kemenkeu pada setiap bulannya;
2. Melakukan pemantauan revisi anggaran baik pagu blokir dan pagu Automatic Adjustment; dan
3. Melakukan pemantauan revisi lembar III DIPA, maupun indikator yang membentuk Nilai Kinerja Anggaran.

IKSK.19 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat kepatuhan merupakan pengukuran pelaksanaan suatu kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Perhitungan tingkat kepatuhan bisa dikontrol bila suatu pelaksanaan program telah sesuai dengan standart.

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 82,94 (nilai) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.6.996.810.131,-.

Tabel 20. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		
-	80	80	80	82,94	103,68	103,68	3,67	80	103,68

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	73,5	76,91	82,85	80	82,94	103,68	80	103,68

Adapun kegiatan yang dilakukan Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu pelaksanaan Rekonsiliasi pengisian SIRUP dan pemantauan proses pemuatan user SIRUP Satker TP Provinsi untuk pengisian RUP.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Aplikasi pemantuan dari LKPP sering terjadi kendala dan tidak up to date; dan
2. Kesesuaian RUP dan pencatatat realisasi PBJ di masing-masing Satker belum ter-update secara realtime.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Satker dalam melakukan proses PBJ
2. Melakukan pembinaan ke Satker khususnya satker UPT dalam melaksanakan proses PBJ
3. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa.

IKSK.20 Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 99,04 (nilai) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.6.996.810.131,-.

Tabel 21. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024			
-	98,32	80	80	99,04	123,80	123,80	0,73	80	123,80

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	84,71	92,37	98,32	80	99,04	123,80	80	123,80

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 yaitu Pelaksanaan penilaian pengawasan kearsipan internal lingkup KKP dan DJPB.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu adaptasi perubahan aplikasi dari aplikasi elayar menjadi aplikasi portal KKP.

Sedangkan rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu melakukan pra penilaian ketaatan Arsip untuk selanjutnya diajukan ke Biro Umum KKP.

IKSK.21 Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya.

Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 100 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.55.721.145.967,-.

Tabel 22. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		
-	100	80	80	100	125	125	-	80	125

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	100	100	80	100	125	80	125

Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah dilaksanakan monitoring dan pemantauan layanan perkantoran, layanan konsumsi rapat, layanan pimpinan serta layanan operasional Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional.

Kendala yang dihadapi yaitu timeline dan rencana kegiatan rapat serta penggunaan kendaraan yang sering berubah.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu Meningkatkan koordinasi dengan Sekretaris pimpinan serta Pemanfaatan layanan konsumsi rapat serta penanggungjawab kendaraan.

IKSK.22 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 3,3 (nilai), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 3,57 (nilai) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.5.221.934.195,-.

Tabel 23. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		
-		3,3	3,3	3,57	108,18	108,18	-	3,3	108,18

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,57	108,18	3,3	108,18

Adapun kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu Telah dilakukan nilai penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal atas komponen struktur dan proses maturitas SPIP yang selanjutnya dilakukan finalisasi (ekspose) nilai maturitas oleh BPKP.

Kendala dalam yang dihadapi dalam pencapaian indicator ini di Tahun 2024 yaitu:

1. Pemenuhan dokumen pada penilaian mandiri maturitas yang masih tidak tepat waktu; dan
2. Perlunya adaptasi peng-input-an pada aplikasi penilaian Maturitas BPKP.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Mempertahankan nilai Maturitas yang telah diperoleh; dan
2. Berkoordinasi dengan Inspektorat Mitra dan Biro Perencanaan terhadap penilaian Maturitas selanjutnya.

IKSK.23 Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.

Pelaksanaan PEKPPP Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

PEKPPP Mandiri Instansional dilakukan terhadap seluruh ruang lingkup pelayanan publik, yaitu pelayanan barang, jasa dan/atau administratif yang ada di masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan dilakukan terhadap seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan KKP.

PEKPPP Mandiri sangat penting dilakukan untuk mendukung capaian target kegiatan utama RB General KKP tahun 2024 yaitu pada sasaran “Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional” melalui kegiatan pelaksanaan pelayanan publik prima. Perubahan sasaran dan kegiatan reformasi birokrasi KKP tahun 2024 tersebut telah ditetapkan dengan Kepmen KP Nomor 166 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kepmen KP Nomor 32 Tahun 2021 *road map* reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melakukan PEKPPP Mandiri pada 18 (delapan belas) Unit Pelayanan Publik dengan hasil nilai sebesar 4,60 (Pelayanan Prima). Hasil tersebut disampaikan oleh Kepala Pusdatin (Pusat Data, Statistik, dan Informasi) melalui Surat Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP Nomor B.521/SJ.7/TU.140/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil PEKPPP Mandiri Instansional KKP Tahun 2023.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (persen), dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 88,23 (persen) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp.929.772.902,-.

Tabel 24. Capaian Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW IV	Tahun 2023	Tahunan	TW IV	TW IV	terhadap target TW IV 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		75	75	88,23	117,64	117,64	-	75	117,64

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	-	75	88,23	117,64	75	117,64

Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu Telah dilaksanakan Asistensi (Pendampingan) Pemantauan Evaluasi Kinerja Penelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam rangka Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai berikut:

1. Pendampingan di BBPBAP Jepara;
2. Pendampingan di BPBL Batam;
3. Pendampingan di BBPBAT Sukabumi;
4. Pendampingan di BPBAT Mandiangin;
5. Pendampingan di BPBL Ambon;
6. Pendampingan di BPBAT Jambi;
7. Pendampingan di BBPBL Lampung;
8. Pendampingan di BPBL Lombok;
9. Pendampingan di BPIU2K Karangasem; dan
10. Pendampingan di BPBL Batam.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator yaitu Update-ing pemenuhan dokumen memerlukan waktu yang berdampak pada ketidaktepatan waktu yang ditetapkan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya yaitu Mempertahankan atau meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) serta melakukan koordinasi dengan UPT yang akan dinilai untuk mempertahankan Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebesar Rp.584.352.167.00,- dengan pagu blokir sebesar Rp.217.037.381.000,- sehingga pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp.367.314.786.000,-. Realisasi Satker Setditjen Perikanan Budi Daya pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.360.515.667.563,- atau sebesar 98,15% dari pagu efektif.

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	2344 Pengelolaan Perbenihan Ikan	PAGU REALISASI	0 0 0.00%	38,681,994,000 37,988,505,057 (98.21%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	38,681,994,000 37,988,505,057 (98.21%)	
		SISA	0	693,488,943	0	0	0	0	0	0	0	693,488,943	
2	2345 Pengelolaan Kawasan Dan Kesehatan Ikan	PAGU REALISASI	0 0 0.00%	175,235,424,000 170,031,857,776 (97.03%)	243,866,826,000 30,562,740,349 (12.53%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	419,102,250,000 200,594,598,125 (47.86%)	
		SISA	0	5,203,566,224	213,304,085,651	0	0	0	0	0	0	218,507,651,875	
3	2346 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	PAGU REALISASI	0 0 0.00%	13,936,167,000 13,926,580,500 (99.93%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	13,936,167,000 13,926,580,500 (99.93%)	
		SISA	0	9,586,500	0	0	0	0	0	0	0	9,586,500	
4	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU REALISASI	41,004,842,000 40,854,595,140 (99.63%)	60,610,581,000 56,197,722,114 (92.72%)	1,750,000,000 1,749,697,360 (99.98%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	103,365,423,000 98,802,014,614 (95.59%)	
		SISA	150,246,860	4,412,858,886	302,640	0	0	0	0	0	0	4,563,408,386	
5	5747 Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	PAGU REALISASI	0 0 0.00%	9,266,333,000 9,203,969,267 (99.33%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	9,266,333,000 9,203,969,267 (99.33%)	
		SISA	0	62,363,733	0	0	0	0	0	0	0	62,363,733	
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	41,004,842,000 40,854,595,140 (99.63%)	297,730,499,000 287,348,634,714 (96.51%)	245,616,826,000 32,312,437,709 (13.16%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	584,352,167,000 360,515,667,563 (61.69%)	
		SISA	150,246,860	10,381,864,286	213,304,388,291	0	0	0	0	0	0	223,836,499,437	

Gambar 10. Serapan Anggaran Satker Setditjen PB Tahun 2024 per Jenis Belanja

Kegiatan di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya masuk ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan dukungan penganggaran sebesar Rp.99.551.029.000,- dari anggaran semula sebesar Rp.103.365.423.000,-, dikarenakan adanya pagu blokir sebesar Rp.3.814.394.000,-.

NO	(KODE) SUMBER DANA	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU REALISASI	41,004,842,000 40,854,595,140 (99.63%)	253,870,725,000 248,665,975,398 (97.95%)	221,676,600,000 10,666,264,759 (4.81%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	516,552,167,000 300,186,835,297 (58.11%)	
		SISA	150,246,860	5,204,749,602	211,010,335,241	0	0	0	0	0	0	216,365,331,703	
2	(B) PINJAMAN LUAR NEGERI	PAGU REALISASI	0 0 0.00%	42,759,774,000 38,682,659,316 (90.47%)	23,940,226,000 21,646,172,950 (90.42%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	66,700,000,000 60,328,832,266 (90.45%)	
		SISA	0	4,077,114,684	2,294,053,050	0	0	0	0	0	0	6,371,167,734	
3	(C) RUPIAH MURNI PENDAMPING	PAGU REALISASI	0 0 0.00%	1,000,000,000 0 (0.00%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	1,000,000,000 0 (0.00%)	
		SISA	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	
4	(I) HIBAH LUAR NEGERI	PAGU REALISASI	0 0 0.00%	100,000,000 0 (0.00%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	100,000,000 0 (0.00%)	
		SISA	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	
5	(Z) DATA SUSPEND UNTUK DIKOREKSI	PAGU REALISASI	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	41,004,842,000 40,854,595,140 (99.63%)	297,730,499,000 287,348,634,714 (96.51%)	245,616,826,000 32,312,437,709 (13.16%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	584,352,167,000 360,515,667,563 (61.69%)	
		SISA	150,246,860	10,381,864,286	213,304,388,291	0	0	0	0	0	0	223,836,499,437	

Gambar 11. Serapan Anggaran Satker Setditjen PB Tahun 2024 per Sumber Dana

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Sesditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 bahwa Sesditjen Perikanan Budi Daya telah melaksanakan tugas, fungsi dan misinya berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam BAB III. Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Alokasi anggaran APBN Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebesar Rp.584.352.167.00,- dengan pagu blokir sebesar Rp.217.037.381.000,- sehingga pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp.367.314.786.000,-. Realisasi Satker Setditjen Perikanan Budi Daya pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.360.515.667.563,- atau sebesar 98,15% dari pagu efektif;
2. Kegiatan di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya masuk ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan dukungan penganggaran sebesar Rp.99.551.029.000,- dari anggaran semula sebesar Rp.103.365.423.000,-, dikarenakan adanya pagu blokir sebesar Rp.3.814.394.000,-; dan
3. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 cukup baik yakni sebesar 111,60 (Nilai) (sumber data Aplikasi Kinerjaku KKP).

Beberapa rekomendasi atas target kinerja yang ditetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya adalah sebagaimana berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan penyediaan dokumen perencanaan kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound (SMART)- Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak.
2	Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan dan mengoptimalkan penganggaran tahun 2025 untuk mendukung pencapaian pelaku usaha budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA
3	Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi dengan pusdatin dan validator tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk percepatan input dan validasi data tahun 2024- Melakukan analisis data capaian produksi tahun 2024

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
4	Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan BIG untuk langkah langkah pelaksanaan deliniasi - Melakukan sosialisasi proses deliniasi kepada eslon 2 lingkup DJPB
5	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan peremajaan data diklat pada aplikasi SIASN bagi pegawai lingkup Setditjen PB - Melakukan penilaian kinerja individu tahun 2024 - Melakukan penataan SDM sesuai dengan perubahan Nomenklatur
6	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan penetapan penyesuaian nomenklatur JF Pengawas Perikanan jenjang keterampilan dan keahlian lainnya (pertama, muda, dan madya) - Menyelesaikan Penetapan Angka Kredit Penyesuaian Nomenklatur JF Pengawas Perikanan jenjang keterampilan dan keahlian lainnya (pertama, muda, dan madya) - Membuat draft Rancangan Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan - Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya untuk instansi daerah berdasarkan rekomendasi/ penetapan prioritas Biro SDM Aparatur dan Organisasi - Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terkait perubahan nomenklatur jabatan fungsional bidang perikanan budidaya dan pengelolaan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya lingkup Instansi Daerah
7	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan proses usul kenaikan pangkat secara berkala - Melakukan peremajaan data pegawai secara periodik
8	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan monitoring dengan Satker di lingkup DJPB agar dapat melakukan update data dukung secara berkala dan tepat waktu

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
9	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Finalisasi penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pengendalian Resistensi Antimikroba pada Perikanan Budi Daya - Berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait tindak lanjut hasil Rancangan Peraturan Menteri KP untuk menjadi Peraturan Menteri KP - Melakukan evaluasi atas per-UU yang berkaitan dengan DJPB terkait isu-isu terbaru
10	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pendampingan dan konsultasi hukum mengenai pengadaan barang dan jasa dibidang perikanan budidaya
11	Unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	<ul style="list-style-type: none"> - Menekankan kepada Satker di lingkup DJPB untuk mematuhi standar 5W1H pada saat melakukan postingan - Menekankan kepada Satker di lingkup DJPB dalam melakukan postingan untuk mencapai jumlah maksimal yang dapat dinilai oleh PUSDATIN sebelum batas waktu yang di tentukan dalam setiap periode
12	Presentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan finalisasi terhadap IA fleming fund fase 2 - Menindaklanjuti dari hasil audiensi dengan pihak mitra - Melakukan tindaklanjut PKS DJPB dengan FPIK IPB dan FPIK UNPAD
13	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengirimkan Surat kepada Unit Kerja Eselon II serta UPT Lingkup DJPB dalam rangka Permintaan Dukungan Data dan Informasi Untuk Keperluan Publikasi meliputi Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB dll. - Melakukan publikasi kegiatan DJPB secara masif dengan melakukan penyebarluasan melalui Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB dll.

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
14	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi dokumen pendukung atas tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI
15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan follow up secara berkala atas data yang sebelumnya telah diminta dan melakukan penyelesaian tidak hanya pada akhir triwulan melainkan di sepanjang triwulan.
16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi revisi halaman III DIPA secara berkala - Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran sesuai target yang telah disusun pada halaman III DIPA
17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inventarisasi aset BMN ke satker binaan di lingkup DJPB (UPT dan Dekon) - Memantau dan mengevaluasi terhadap Satker yang perlu melakukan penghapusan aset BMN yang rusak berat - Melakukan peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan aset BMN.
18	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan input Capaian Output pada aplikasi SAKTI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh kemenkeu pada setiap bulannya - Melakukan pemantauan revisi anggaran baik pagu blokir dan pagu Automatic Adjustment - Melakukan pemantauan revisi lembar III DIPA, maupun indikator yang membentuk Nilai Kinerja Anggaran
19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Satker dalam melakukan proses PBJ - Melakukan pembinaan ke Satker khususnya satker UPT dalam melaksanakan proses PBJ - Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa
20	Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pra penilaian ketaatan Arsip untuk selanjutnya diajukan ke Biro Umum KKP

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
21	Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan Sekretaris pimpinan serta Pemanfaatan layanan konsumsi rapat serta penanggungjawab kendaraan
22	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggara SPIP Unit DJPB	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan nilai Maturitas yang telah diperoleh - Berkoordinasi dengan Inspektorat Mitra dan Biro Perencanaan terhadap penilaian Maturitas selanjutnya
23	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan atau meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Melakukan koordinasi dengan UPT yang akan dinilai untuk mempertahankan Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

LAMPIRAN

Lampiran I : Perjanjian Kinerja Awal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL dijenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya

Gemi Triastutik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1.	Nilai PM SAKIP Setditjen PB (Persen)	82
		2.	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
		3.	Persentase Data Produksi Perikanan Budi Daya yang Tervalidasi (Persen)	80
		4.	Persentase Data Realisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan Ikan yang Terintegrasi (Persen)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budidaya (Indeks)	85
		6.	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya (Nilai)	75
		7.	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB (Level)	3
		8.	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP (Nilai)	76
		9.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
		10.	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani (Persen)	65
		11.	Unit Kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12. Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	90
		13. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya (Persen)	≥86
		14. Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 (Persen)	100
		15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
		16. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,76
		17. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	80
		18. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	86
		19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
		20. Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
		21. Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	22. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB (Nilai)	3,3
	23. Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri (Persen)	75

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	111.906.162.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024		111.906.162.000

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik

Lampiran II : Perjanjian Kinerja Revisi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya

Gemi Triastutik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1.	Nilai PM SAKIP Setditjen PB (Persen)	82
		2.	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
		3.	Persentase Data Produksi Perikanan Budi Daya yang Tervalidasi (Persen)	80
		4.	Persentase Data Realisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan Ikan yang Terintegrasi (Persen)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budidaya (Indeks)	85
		6.	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya (Nilai)	75
		7.	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB (Level)	3
		8.	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP (Nilai)	76
		9.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
		10.	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani (Persen)	65
		11.	Unit Kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94
		12.	Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	90
		13.	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya (Persen)	≥86
		14.	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023 (Persen)	
		15.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
		16.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,76
		17.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	80
		18.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	71
		19.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
		20.	Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
		21.	Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
		22.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB (Nilai)	3,3
		23.	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri (Persen)	75

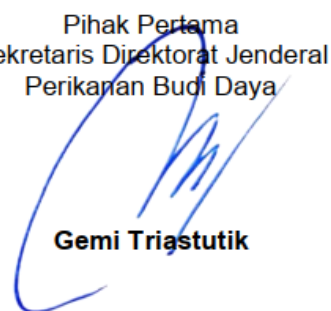
Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	111.906.162.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024		111.906.162.000

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041**